



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 353 TAHUN 2024

PENETAPAN SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENPASAR
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang bahwa mempedomani Amar Putusan Mahkamah : a. Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan 70/PUU-XXII/2024 Hukum Nomor sebagaimana ketentuan angka 2 huruf a Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Peserta Pemilu Gabungan Partai Politik, dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) dari akumulasi perolehan suara sah Pemilu DPRD dalam anggota di daerah yang bersangkutan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar telah menetapkan syarat minimal perolehan suara sah sebagai syarat pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik melalui rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi

Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 301/PK.01-BA/5171/2/2024 tanggal 24 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 147 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Denpasar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar 6. Nomor 210 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2024;
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 215 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENPASAR TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun

2024 untuk Pemilihan Walikota dan Walikota Denpasar Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. jumlah penduduk yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap Kota Denpasar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak 495.896 (empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh enam) pemilih sehingga syarat minimal suara sah adalah 8,5 % (delapan koma lima persen);
- b. jumlah suara sah paling sedikit 8,5 % (delapan koma lima persen) dari 368.264 (tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh empat) suara sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu sebanyak 31.303 (tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga) suara sah.

KEDUA

: Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi syarat minimal bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk mengusulkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2024.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 24 Agustus 2024

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan

ttd.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DENPASAR

DEWA AYU SEKAR ANGGARAENI

T Made Artawan

Masyarakat,